

# KEPANDUAN DAN POLITIK: GERAKAN *PADVINDERS* DI PADANG PANJANG 1926-1934

## SCOUTING AND POLITIC: THE SCOUT MOVEMENT IN PADANG PANJANG DURING 1926-1934

Fikrul Hanif Sufyan

STKIP Yayasan Abdi Pendidikan  
Jl. Prof. M. Yamin Kota Payakumbuh  
e-mail: fikrulhanif1980@gmail.com

Naskah Diterima: 17 Mei 2020

Naskah Direvisi: 2 Maret 2021

Naskah Disetujui : 30 April 2021

DOI: 10.30959/patanjala.v13i1.630

### Abstrak

Gerakan kepanduan pernah meledak di Afdeling Batipuh X dan Priaman di awal abad ke-20. Tulisan ini bertujuan menganalisis hadirnya gerakan kepanduan dengan segala dinamikanya. Gerakan kepanduan ini beberapa kali melakukan gebrakan serta tuntutan Indonesia merdeka yang mereka suarakan langsung dari Padang Panjang. Mulai dari gerakan protes, hingga membentuk Pendidikan Nasional Indonesia, atau dikenal dengan istilah PNI Baru Hatta-Sjahrir. Tulisan ini disusun berdasarkan kaidah metode sejarah –dimulai dengan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. *Padvinders* di Padang Panjang telah dimulai sejak tahun 1924. Gerakan yang hadir di Padang Panjang antara lain *International Padvinders Organitatie*, *El-Hilaal*, *Hizbul Wathan*, dan *Kepanduan Indonesia Muslim (KIM)*. Masing-masing kepanduan lahir dari sekolah-sekolah yang muncul sejak awal abad ke-20, kemudian bermetamorfosis menjadi sebuah gerakan politik. Gerakan politik KIM menjadi PNI Baru, telah mengubah paradigma kepanduan –yang selama ini hanya dianggap sebagai kegiatan ekstrakurikuler sekolah.

**Kata Kunci:** kepanduan, *padvinders*, Padang Panjang, gerakan politik

### Abstract

The scout movement rose to fame in the afdeling of Batipuh X and Priaman in the early 20<sup>th</sup> century. This paper is designed to analyze the presence of the scout movement and related matters. It had constituted a break with years of colonial era and pushed for an independent Indonesia, which they voiced directly from Padang Panjang. The movements they organized was from the protest movement to the formation of the Pendidikan Nasional Indonesia or more popularly known as the PNI Baru Hatta – Sjahrir. The paper is organized according to the standard historical method rules; heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The scout movement, it all started in Padang Panjang in 1924. The *International Padvinders Organitatie*, the *El-Hilaal*, the *Hizbul Wathan*, and the *Kepanduan Indonesia Muslim (KIM)* were around then. They were originally established in schools at the beginning of the 20<sup>th</sup> century who transformed into the political movement then. KIM, which turned into a political movement or known as PNI Baru, has changed the scouting paradigm, which so far has only been regarded as the extracurricular school activity.

**Keywords:** scouting, *padvinders*, Padang Panjang, political movements

## A. PENDAHULUAN

Padang Panjang merupakan ibukota dari *Afdeling* Batipuh X Priaman. Kota kecil–yang disebut Kahin (1979) sebagai penghubung antara daerah pesisir Pantai Barat Sumatra dengan pedalaman Minangkabau.

Hadirnya moda transportasi massal kereta api di akhir abad ke-19, seiring ditemukannya batubara di Sawahlunto – ikut mempercepat laju mobilitas barang dan manusia dari/ke pedalaman Minangkabau (Sufyan, 2017). Ditambah, makin tingginya kesadaran dari orang Minang, untuk naik haji –turut mempercepat laju pertumbuhan Islam modernis di awal abad ke-20.

Seluruh faktor-faktor di atas menjadi sebab hadirnya sekolah-sekolah swasta Islam modernis di Padang Panjang. Jejak-jejak sekolah Islam modernis–yang masih eksis sampai kini, di antaranya *Sumatra Thawalib*, *Diniyah School*, dan sekolah milik persyarikatan Muhammadiyah. Sekolah lainnya mengusung ideologi *Kuminih*, yakni Sekolah Rakyat–yang didirikan Sarekat Rakyat Padang Panjang.

Satu hal menarik, pertumbuhan sekolah di Padang Panjang –juga diikuti dengan kegiatan ekstra kurikuler kependuan, atau lazim pada masa itu dinamakan *padvinders*. Bila diurut berdasar kronologisnya, diawali *International Padvinders Organizatie (IPO)* milik Sekolah Rakyat, *El-Hilaal* milik Sumatra Thawalib-Diniyah School, Hizbul Wathan (Muhammadiyah), dan Kependuan Indonesia Muslim (KIM) milik Diniyah School Padang Panjang (Salim, 1977).

Masing-masing *padvinders*, nantinya mengalami dinamika tersendiri dalam gerakan-nya. Pada tahun 1930 gabungan dari kependuan Padang Panjang dan Fort de Kock–bergerak menuntut Asisten Residen Padang Panjang segera menuntaskan persoalan kemerosotan ekonomi, akibat depresi ekonomi (Salim, 1980: 11). Akibatnya beberapa orang dari

pengurus El-Hilaal dan Hizbul Wathan ditahan oleh *veldpolitie*.

Gerakan protes selanjutnya terjadi dua belas tahun kemudian. Tepatnya, di akhir peme-rintah Kolonial Belanda. Residen Sumatra Barat tidak ingin menyerah begitu saja pada tentara Dai Nippon. Mereka ingin menjadikan Bukit Barisan sebagai benteng pertahanan terakhir dan membumi hanguskan pedalaman Minangkabau. Niat jahat Residen inilah yang ditantang habis-habisan oleh eks Kependuan Indonesia Muslim, lewat demonstrasi gagal di *Afdeling* Tanah Datar, *Afdeling* Batipuh X Priaman, dan Fort de Kock. Namun, rencana itu keburu bocor. Mereka yang terlibat sebagai penggagas ditangkap *veldpolitie* yang dikoordinir *hoofd djaksa*. Mereka pun dibuang ke Kutacane pada Maret 1942.

Kajian gerakan *padvinders* di Padang Panjang ini tentu menarik, mengingat IPO, El-Hilaal, dan KIM tidak tercatat dalam direktori sejarah *padvinders* yang dirilis dalam daftar kependuan organisasi di Indonesia, sejak *Nederlandsche Padvinders Organizatie* (NPO) sampai Komite Kepramukaan Indonesia (KPPI).

Untuk menguraikan kisah gerakan kependuan ini lebih lanjut, ada beberapa item pertanyaan yang bisa diajukan, bagaimana pertumbuhan *padvinders* di Padang Panjang? Bagaimana model gerakan protes yang dibangun *padvinders* di Padang Panjang tahun 1930 dan 1942? Semua pertanyaan tersebut, akan terjawab dalam pembahasan berikutnya.

Tulisan yang membahas persoalan *padvinders* memang masih terbatas dan belum ditemukan dalam bentuk jurnal. *75 Tahun Kependuan dan Kepramukaan* – ditulis oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dirilis pada tahun 1975. Dalam buku ini membahas tentang perkembangan *padvinders* di tanah air, sejak masa Kolonial Belanda di bawah kendali *Nederlandsche Padvinders Organizatie* (NPO) sampai di masa kontemporer dikoordinir oleh KPPI. Namun, tulisan ini tidak satu pun membahas munculnya IPO,

El Hilaal, dan KIM di Padang Panjang. Dan, tentu saja persoalan yang disentuh nantinya berdasar spatial dan temporal juga berbeda.

Y Prasetyaningtyas (2012) dalam *Status Keanggotaan Warga Negara Asing dalam Gerakan Pramuka Ditinjau dari Peraturan Perundangan*, membahas sekelumit kisah perkembangan kepanduan. Ia menarasikan bagaimana gerakan *padvinders* telah muncul sejak masa Kolonial Belanda, mulai dari sekolah, dan organisasi pergerakan. Namun, dalam pembahasannya, ia tidak sedikitpun menyentuh persoalan gerakan kepanduan di Padang Panjang. Dari dua acuan tinjauan pustaka di atas, belum ada tulisan yang mengisahkan masalah gerakan kepanduan di Padang Panjang.

Untuk memahami lebih lanjut interaksi, dan konflik antar organisasi kepanduan dengan pemerintah Afdeling Batipuh X Priaman, terlebih dahulu beberapa pendapat para ahli. Arnold J. Toynbee, dalam Lauer (2001) dengan teorinya *Challenge and Response*, menyebutkan bahwa apabila ada suatu tantangan maka akan timbul tanggapan atau jawaban terhadap tantangan itu. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, munculnya organisasi kepanduan, merupakan tantangan bagi munculnya kepanduan-kepanduan masyarakat pribumi. Dan kepanduan masyarakat pribumi yang berhaluan Islam juga tantangan, atau *challenge* bagi munculnya kepanduan yang berhaluan nasionalis, Islam, dan Komunis di Padang Panjang.

Semakin besar tantangan yang muncul, maka makin keras tanggapan terhadap konflik itu. Karena itu, peristiwa sejarah patut diteliti dan dicermati berdasarkan teori tadi, adalah setiap aktivitas yang dilakukan oleh *padvinders* dan kepanduan yang berhaluan Islam yang kedua-duanya merupakan tantangan, untuk kemudian melihat reaksi kepanduan yang bercorak etnis-keagamaan sebagai jawabannya.

Selain teori tadi, juga dipakai teori tentang kelompok. Terjadinya kelompok bermula dari tumbuhnya kesadaran akan keterikatan anggotanya terhadap kelompok, yang menjadi ciri *primary group* (kelompok primer). Salah satu teori Cooley, menyebutkan bahwa fungsi kelompok primer itu adalah membantu proses pendewasaan anggotanya (Susanto, 1985: 54). Pergulatan atau kehidupan berbagai kelompok tersebut, akan menimbulkan sikap integrasi dan konflik individu, kelompok dan antar kelompok. Teori ini, membantu untuk menganalisis gerakan kepanduan Islam (El-Hilaal, Hizbul Wathan, dan Kepanduan Muslim Indonesia) dan Komunis (IPO) etnis-keagamaan itu adalah kelompok primer. Dari interaksi berbagai kelompok primer tadi memicu integrasi dan konflik sesama kelompok.

Konsep lainnya yang digunakan adalah gerakan sosial. Konsepsi gerakan sosial menurut Turner dan Killian (1987: 223) bisa dikategorikan dalam perspektif "perilaku kolektif". Menurut keduanya, gerakan sosial merupakan sebuah bentuk khusus dari perilaku kolektif yang dibedakan terhadap perilaku "organisasional" dan "institusional". Berbeda dari Turner dan Killian (McCarthy dan Zald 1977: 1217-1218) menggunakan pendekatan perilaku kolektif dengan memberikan perhatian yang jauh lebih besar kepada pentingnya faktor peran organisasi dalam gerakan sosial, yang mereka sebut *resource mobilisation theory*. Seluruh konsep teori ini, digunakan untuk menganalisis persoalan gerakan kepanduan di Kota Padang Panjang.

## B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode sejarah yang meliputi empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, analisis sintesis (interpretasi), dan penulisan. (Kartodirdjo, 1992). Tahap pertama, adalah heuristik. Heuristik merupakan tahap pencarian dan pengumpulan sumber-sumber sejarah. Sumber yang digunakan dalam tulisan ini

berupa sumber tertulis, sumber lisan, dan artefak. Sumber-sumber tertulis meliputi arsip baik yang diproduksi oleh pemerintah kolonial Belanda dan Indonesia. Sumber-sumber itu antara lain terdapat di Arsip Nasional RI, dan Perpustakaan Pribadi Leon Salim, dan Perpustakaan Pribadi Sudarman Chatib.

Arsip yang diperoleh berupa *staadblaad*, *mailrapport*, manuskrip, dan lainnya. Arsip lain yang dapat dimanfaatkan berupa arsip pribadi yang masih disimpan oleh perorangan. Sumber lain yang dapat digunakan adalah surat kabar dan majalah baik yang terbit masa kolonial Belanda, hingga masa kontemporer.

Tahap kedua adalah kritik sumber, yang dapat dibagi atas kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern dilakukan untuk mencari otentisitas arsip dan dokumen yang diperoleh. Sedangkan kritik intern dilakukan terhadap isi dokumen yang otentik tersebut untuk memperoleh validitas data yang dikandungnya. Kritik ekstern terhadap sumber-sumber sejarah dilakukan dengan cara memilih bacaan dan dokumen yang bersentuhan dengan tema penelitian. Informasi yang diberikan kemudian dicross check dengan informasi yang disampaikan sumber bacaan lainnya. Sehingga validitas informasi yang diberikan dapat teruji.

Tahap ketiga adalah analisis dan sintesis data (interpretasi). Fakta yang diperoleh, dari sumber tertulis dianalisis dengan menggunakan analisis prosedural dan struktural (Lloyd 1993). Analisis prosedural digunakan guna menemukan perkembangan kependuan di Kota Padang Panjang. Selain itu, dalam analisis ini juga dipakai melihat gerakan protes kependuan terhadap kebijakan pemerintah Kolonial Belanda. Analisis struktural digunakan untuk menganalisis kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda dan pengaruhnya terhadap masyarakat dan memicu protes *padvinders*.

Tahap keempat yaitu tahap penulisan (historiografi). Penulisan berbentuk sejarah

gerakan sosial dengan obyek kependuan El-Hilaal, IPO, Hizbul Wathan, dan KIM.

## C. HASIL DAN BAHASAN

### 1. Sekolah dan Pertumbuhan

#### Kependuan

#### a. Padang Panjang dalam Lokus

##### Pergerakan

Sebelum menjadi kota, Padang Panjang selalu dihubungkan dengan *Kelurahan IV Koto* (terdiri dari nagari Gunung, Jaho, Tambangan, dan Paninjauan), *VI Koto* (terdiri dari nagari Singgalang, nagari Panyalaian, Air Hangat, Pandai Sikek, Koto Laweh, dan Koto Baru) dan Batipuh (Yunus, 1963: 1). Ketiga *kelurahan* tersebut merupakan gerbang lalu lintas manusia dan perdagangan yang berlangsung jauh sebelum abad ke-19. Bahkan dalam historiografi tradisional Minangkabau dikisahkan, seringnya terjadi perampokan dan pembunuhan terhadap para saudagar yang melewati *kelurahan* Batipuh, IV Koto, dan VI Koto.

Kondisi daerah Padang Panjang yang subur dinarasikan oleh Dobbin (2008: 6). Kawasan tersebut dikelilingi oleh dua gunung aktif—Tandikat dan Merapi yang intens menyemburkan abu vukaniknya. Kondisi tanah yang subur, memungkinkan nagari-nagari Batipuh, IV Koto, dan VI Koto subur dengan tanaman padi, sayuran, dan palawija. Untuk tanaman padi sawah, pengairan didukung melimpahnya air pegunungan yang mengalir tiada hentinya. Dobbin menambahkan, bahwa pada suatu periode, jauh sebelum masa yang dibahas dalam buku ini, orang Minangkabau telah memilih budidaya sawah basah, baik di dasar lembah maupun di tebing pegunungan.

Padang Panjang merupakan kawasan konsensus dari dua daerah konflik, yakni *kelurahan IV Koto* dan *VI Koto*. Masyarakat yang bermukim di dua *kelurahan* berbeda itu, senantiasa terlibat bentrok fisik sejak 1816. Sumber konflik hanya bermula dari persoalan *Pekan Jumat*. Untuk meredakan konflik berkepanjangan itu, rakyat IV Koto, VI

Koto, dan Batipuh, menunjuk ulama tarekat Syattariyah yang kharismatik, yakni Tuanku Mansiangan yang berkedudukan di Nagari Koto Laweh.

Sebagai gerbang masuknya aliran-aliran keagamaan, terutama pada awal abad ke-19 sering dihubungkan dengan keberhasilan puritanisme yang diusung gerakan Padri (Azra, 2004: 73) Untuk memahami *puritanisme* di Padang Panjang, tidak lepas dari proses Islamisasi yang terus berlanjut dan berdampak pada perubahan sosial dalam masyarakatnya.

Sejak pantai barat Sumatra dikuasai Kolonial Belanda, menurut Taufik Abdullah— telah mendorong orang Minang berani menempuh perjalanan jauh ke tanah suci, guna menunaikan haji dan mendalami Islam merupakan situasi yang melatarbelakangi Padri (Abdullah, 1971: 7)

Pasca kekalahan Padri, pemerintah Kolonial Belanda melakukan modernisasi terhadap transportasi dan prasarana jalan (Lindblad, 1998: 360-361). Setelah jalan raya dibangun, lalu lintas hasil bumi dari dan menuju pedalaman Minangkabau menjadi ramai. Selain bertujuan ekonomis, pembangunan jalan raya juga bermuatan politis.

Membaiknya prasarana jalan, menyebabkan lalu lintas manusia dan barang makin meningkat di Padang Panjang. Makin kompleksnya persoalan di Sumatra Barat masa itu, mendorong pemerintah Kolonial Belanda membentuk sistem kelarasan di Sumatra Barat.

Pemerintah Belanda tahun 1850 menggabungkan kelarasan IV Koto, VI Koto, Batipuh Atas, Batipuh Bawah, Bungo Tanjung, Sumpur, dan Simawang menjadi *Onderafdeling* Batipuh X Koto (Padang Panjang).



Gambar 1. Suasana stasiun kereta api di Kota Padang Panjang, sebelum bencana alam tahun 1892

Sumber: KITLV, 1892.

Menunggu selama 38 tahun, sejak keluarnya *Staatsblad No.161 tahun 1888* (bertepatan dengan 1 Desember 1888), pemerintah Hindia Belanda menetapkan Padang Panjang sebagai *Afdeling* dan mengangkat Asisten Residen pertamanya, H.E Prince.

Pada masa tugasnya, Asisten Residen melaksanakan beberapa program pembangunan, yang dibantu penghulu di Batipuh X Koto dan Tuanku Lareh VI Koto. *Pertama*, pembangunan gelanggang pacuan kuda Bancah Laweh dimulai tahun 1888 dan selesai tahun 1894 pada masa Asisten Residen Mathoofds. *Kedua*, pembangunan *loods* (los) pekan Jumat yang dibantu oleh Tuanku Lareh VI Koto (Yunus, 1963: 4).

Sarana transportasi yang menghubungkan Padang Panjang dan daerah lainnya makin *complicated*, ketika de Grave menemukan batubara di sepanjang Batang Ombilin tahun 1868 (*Verslag der Exploitatie van den Staatsspoorweg ter Sumatra's Westkust en van de Ombilin-kolenvelden over 1893*). Keputusan Belanda mencari batubara ke negeri jajahan pada abad ke-19 menjadi awal tumbuhnya pertambangan modern batubara di wilayah Nusantara (Furnivall, 1948: 235-236).

Sebelum memproduksi batubara dalam skala besar, pemerintah membangun infrastruktur penting, seperti pelabuhan

Emmahaven di Padang dan jalur rel kereta api. Pelabuhan Emmahaven pada masa itu, bisa disebut sebagai pelabuhan batubara yang termmodern di Asia Tenggara. Selain itu, di pelabuhan-yang kini bernama Teluk Bayur itu, terdapat tiga corong pengisian batubara dengan total kapasitas 280 ton per jam (*Nederlandsch Indische Havens*, 1920:65; van Doom, 1895: 149).

Jalur rel kereta api yang awal dibangun pemerintah adalah menghubungkan Padang dan Padang Panjang tahun 1891. Untuk menembus rintangan alam yang berbukit karang, curam, terjal, kereta api membutuhkan rel bergigi. Dibandingkan di Jawa, penyelesaian proyek rel kereta api Padang-Padang Panjang menyedot investasi yang tidak sedikit. Meskipun demikian, keberadaan rel tersebut membantu lalu lintas manusia, barang, dan perekonomian di *afdeling* Padang Panjang.

Setahun setelah kokoh berdiri, jembatan kereta api yang berlokasi di Lembah Anai runtuh, diterjang banjir bandang yang terjadi pada Desember 1892. Dahsyatnya bencana alam ini diduga karena luapan air yang membanjiri lembah Anai, telah membawa puluhan batu berukuran besar, meruntuhkan jembatan, juga merusak infrastruktur kereta api di lembah Anai.

## **b. Sebaran Sekolah dan Gerakan Politik**

Sejak Theodore van Deventer mengkritik gaya memerintah Kolonial Belanda di tanah jajahan, pemerintah mulai memperhatikan nasib bumiputra –terutama bidang pendidikan.

Di Minangkabau, kesadaran diri orang Minang terhadap tatanan nilai-nilai baru, sebenarnya telah didengungkan Abdul Rivai–seorang intelektual asal nagari Matur, yang menempuh studi kedokteran di negeri Belanda tahun 1901.

Sebagai editor *Bintang Hindia*, Rivai yang kali pertama mengenalkan konsep Kaum Muda–suatu kekuatan sosial yang bergerak ke arah dunia maju. Dalam

konsep yang digagasnya, Kaum Muda tampil sebagai tandingan dari Kaum Tua–golongan yang mempertahankan “pusaka lama”, warisan turun temurun. Sebagai catatan, sejak berdiam di Eropa dan menulis untuk negeri yang masih bernama “tanah Hindia”, maka bisa dipahami, mengapa Rivai disebut sebagai pemikir pertama dalam lokus Minangkabau menganjurkan agar kaum bumiputra mendirikan organisasi sukarela sebagai saluran ke arah terlaksananya cita-cita kemajuan (*Bintang Hindia No.3*, 1904: 38).

Pasca drama tragis bela harga diri dengan kekerasan dalam Perang *Belasting*, perhatian orang Minang kembali diarahkan kepada langkah pembaruan. Seruan kemajuan yang disuarakan di awal abad 20, semakin menggema. Dalam suasana inilah, Sumatera Barat secara bertahap menunjukkan diri sebagai wilayah dengan persentase tertinggi anak-anak memasuki sekolah.

Sumatera Barat selanjutnya, dalam bahasa Taufik Abdullah dalam Sufyan (2017: vi), menjadi saluran wacana–*channel of discourse*–juga melangkah dengan tegap memasuki dan semakin aktif dalam suasana *print culture*. Wacana dan dialektika pembaruan Islam menjadi santapan pembaca yang mudah ditemukan dalam media cetak.

Masa pencerahan terhadap orang Minang –juga dipermudah dengan akses moda transportasi massal–sejak akhir abad ke-19. Hadirnya kereta api turut mempercepat mobilitas manusia dan barang dari/ke pedalaman Minangkabau. Jauhnya jarak tempuh, tidak lagi menjadi kendala berarti, mengingat medan perjalanan dari pesisir pantai Barat Sumatra ke pedalaman Minangkabau terjal dan berbukit-bukit.

Kapal laut yang bersandar di Emmahaven (kini: Teluk Bayur)–turut andil memudahkan gerak rantau orang Minang–terutama menempuh pendidikan di luar Sumatra Barat, bahkan sampai ke Timur Tengah. Murid-murid binaan Syekh

Ahmad Chatib al-Minangkabawi—seorang imam besar dan pengajar di Mekah, inilah yang selanjutnya menggerakkan modernisasi Islam, lewat dakwah, pers, persyarikatan, dan sekolah.

Haji Abdullah Ahmad dan Haji Abdul Karim Amrullah (HAKA)—yang mengawali gerakan Islam modernis di Padang Panjang. Surau Jembatan Besi milik Haji Abdullah Ahmad, kemudian dilanjutkan pembinaannya oleh HAKA Wajah Padang Panjang—sebagai ibukota dari *Afdeling* Batipuh X Priaman, mulai berubah sejak berdirinya sekolah-sekolah swasta—yang mengusung warna Islam modernis.

Sekolah swasta Islam itu bertumbuh dari surau, maupun perkumpulan pengajian. Persatuan Murid Diniyah School (PMDS), *Groep Studi Membaca* (milik Zainuddin Labay), *Muzakaratul Ikhwan* Parabek (embrio Thawalib Parabek), *Mu'azzamaddin* Padang, Perkumpulan Pelambuk Pendidikan dan Pengajaran Matur, *Jami'atul Ikhwan* Parabek, *Sabilussalam* Bukittinggi, Sarekat Minangkabau Pariaman, Sarekat Adat Alam Minangkabau, dan lainnya (*Surat Asisten Sumatera Barat* tanggal 10 November 1933 No.2505/P/Geheim).

Secara berturut-turut dua sekolah modernis hadir di Padang Panjang, yakni Diniyah School (1915) dan Sumatra Thawalib (1918). Kurikulum yang diusung oleh kedua sekolah tersebut, sudah mengadopsi materi agama Islam dan pengetahuan umum. Sampai akhirnya, gerakan Islam-Marxis—yang jamak dikenal orang Minang dengan sebutan *Kuminih* mengemuka dari Sumatra Thawalib.

Gerakan *Kuminih* yang digawangi guru bantu di Sumatra Thawalib—Haji Datuk Batuah, menurut Fikrul Hanif dalam Margana (2018)—telah menyeret sekolah ini dalam ranah politik dan *vis a vis* dengan pemerintah Kolonial Belanda pada November 1923. Tidak mencapai satu bulan, Asisten Residen Padang Panjang cemas, dengan pergerakan *Kuminih*—yang mampu menarik simpati dari kalangan

terdidik dan tidak terdidik. Melalui tangan *HoofdJaksa*, PID, dan *veldpolitie* dua orang propagandis *Kuminih* Haji Datuk Batuah dan Natar Zainuddin diringkus, kemudian dibuang ke Kafanenu dan Kalabahi, dan diinternir di Tanah Merah Boven Digoel (Sufyan, 2017).

Pasca peringkusan itu, *Kuminih* tidaklah padam, malah tambah membesar. Cita-cita Haji Datuk Batuah dan Natar untuk membangun Sekolah Rakyat pada Oktober 1923, baru terwujud pada tahun 1924.

Sekolah Rakyat menurut Kahin, mengikuti pola-pola sekolah yang didirikan Tan Malaka di Semarang. Bila sinyalemennya benar, maka Sarekat Rakyat Padang Panjang telah mengadopsi tiga dasar pemikiran Tan Malaka dalam rancangan kurikulum SR.

Tiga pemikiran Tan Malaka dalam kurikulum sekolahnya adalah (1) memberi senjata cukup buat pencari penghidupan dan dunia kemodalan (berhitung, menulis, ilmu bumi, bahasa Belanda, Jawa, Melayu, dan lainnya); (2) memberi haknya murid-murid, yakni kesukaan hidup dengan jalan pergaulan (*vereeniging*); (3) menunjukkan kewajiban kelak terhadap berjuta-juta kromo (“Sekolah ala Tan Malaka” dalam <http://historia.id/modern/sekolah-ala-tan-malaka>)

Satu keunikan dari Sekolah ala Tan Malaka adalah kurikulum bahasa Belanda yang diberikan kepada murid-muridnya yang mayoritas berasal dari kelas proletariat. Padahal, pelajaran yang cukup sulit ini, hanya diajarkan untuk sekolah-sekolah *parlente* saja.

Kurikulum SR yang unik, juga identik dengan organ kepemudaan, misalnya Barisan Muda. Menurut G.F.E Gonggrijp—Residen Sumatera Barat, bahwa organisasi itu berbasis di sekolah-sekolah “merah” milik swasta.

Di nagari Dandung-dandung Luhak Limapuluh Koto, beberapa orang murid seperti Damanhuri Jamil, Suhaimi Rasjad, dan Leon Salim dipecat dari *Volk School* pada April 1925. Mereka merintis cabang

Barisan Muda di sekolahnya. Ketiganya lalu masuk SR Padang Panjang. Leon Salim dalam autobiografinya, mengakui bahwa anggota Barisan Muda di Padang Panjang lebih aktif, dibandingkan ketika bersekolah di Dandung-dandung.

Leon Salim (1980) dalam memoarnya menulis, meskipun tidak berjumpa dengan Haji Datuk Batuah dan Natar, ia merasakan spirit keduanya dari informasi mentor politiknya Haji Muhammad Nur Ibrahim—ketua Sarekat Rakyat Padang Panjang tahun 1925. Leon mengisahkan, proses kaderisasi untuk siswa Sarekat Rakyat tetap dilaksanakan di *Internationale Debating Club* (IDC) Pasar Usang dan kantor Sarekat Rakyat Padang Panjang.

Khusus untuk bacaan dan informasi terbaru pergerakan *Kuminih* di belahan dunia hingga lokal, diperoleh siswa-siswa SR melalui Surat Kabar *Pemandangan Islam*, *Djago! Djago!*, dan *Doenia Achirat*. Satu artikel yang membakar semangat Leon, adalah ketika ia menjumpai artikel, “Kuburlah Kapitalisme! Hiduplah Komunisme!” (*Djago! Djago!*, tanggal 4 April 1924).

Haji Muhammad Nur Ibrahim meyakinkan Leon, bahwa bibit Komunis sudah tersebar di Jawa, Sumatra, Celebes, Borneo akan terus melawan kapitalisme Belanda yang menyengsara-kan rakyat. Dan, gerakan perlawanan *Kuminih* tentu berdampak dalam strateginya. Bila terjadinya pelemparan bom, aksi pembakaran di Solo, Madiun, Yogyakarta, Semarang, dan Sumatra, langsung dialamatkan kepada *Communisten*.

Selain aktif di IDC, murid-murid Sekolah Rakyat juga aktif di kepanduan *Internationale Padvindere Organisatie* (IPO). Bisa dikatakan, bahwa IPO adalah organisasi kepanduan awal di Sumatra Barat, atau delapan tahun pasca berdirinya *Javanche Padvindere Organisatie* (JPO).



Gambar 2. *Hoofdbestuur Internationale Padvindere Organisatie* (IPO) yang didirikan Leon Salim cs di Sumatera Barat. Leon (keempat dari kiri) yang masih bersekolah di SR Pasar Usang Padang Panjang, bersama M. Junus Kotjek (paling kiri), Asadudin (kedua dari kiri), Amir Chan (ketiga dari kiri), dan Nazaruddin (paling kanan)  
Sumber: Salim, 1924.

Satu kalimat yang sering diulang-ulang, dan lekat dalam ingatan Leon dalam pembekalan politik IPO adalah,

Biarpun rintangan sangat hebat didatang-kan pada kaum *Communisten*, seperti dibui, dibuang, dan dibunuh, tetapi tidak akan menghalangi pergerakan. Sebab hal-hal yang menghalangi pergerakan kita itu, kita berseru kepada saudara yang berhaluan revolusioner, supaya lebih revolusioner dalam perlawanannya yang maha hebat dan tangkas ini, Kuburlah Kapitalisme!, Hiduplah Komunisme! (*Djago! Djago!* tanggal 4 April 1924).

Sepanjang tahun 1924, *Communisten* tetap konsisten menyuarakan perlawanan terhadap kapitalisme yang menjangkiti ranah Minang, sekaligus mempropagandakan gerakan mereka, baik lewat surat kabar, maupun rapat umum.

Bila Sarekat Rakyat punya IPO, Sumatra Thawalib dan Diniyah School mempunyai kepanduan El-Hilaal. Narasi El-Hilaal, diungkap Leon Salim dalam manuskripnya. Selepas tamat dari Sekolah

Rakyat tahun 1926, ia melanjutkan sekolahnya di Diniyah School (Salim, 1980).

El-Hilaal sendiri terbentuk dari ikrar sebelas orang pelajar Diniyah dan Sumatra Thawalib, termasuk di dalamnya Leon Salim tahun 1926. Kesebelas pelajar berkumpul, pasca dua tahun meletusnya peristiwa Silungkang yang mengguncang jiwa orang Minang. Banyaknya jiwa yang melayang dan ditangkap *veldpolitie* Belanda, merupakan sebab-sebab sepinya dunia pergerakan di Sumatera Barat dalam dua tahun, pasca peristiwa Silungkang (Zed, 2004).



Gambar 3. Perintis dari El-Hillal. Dari kiri ke kanan Leon Salim (Sekretaris), M. Yunus Kocek (Ketua), dan Mahyuddin Tonex (Komisaris)

Sumber: Salim, 1924.

Dari 30 undangan yang dilayangkan untuk siswa Diniyah dan Thawalib, hanya sebelas orang saja yang hadir di Bioskop Rex Padang Panjang. Mereka adalah Leon Salim (Payakumbuh), Hasa-nuddin Yunus (Sungai Puar), Luthan Gani (Maninjau), Damanhuri (Payakumbuh), Mahyud-din Tonex (Pariaman), A. Murad (Sungai Puar), Muhammad Yunus Kocek (Sinabang Aceh), Hasanuddin Arif (Teluk Betung Lampung), Danil Sulaiman (Kroe Bengkulu), Assauddin Kimin (Singkel Aceh), dan Jumhur Kahar (Sibolga Tapanuli). Dalam pertemuan awal, dicanangkan kepanduan El-Hilaal dalam ikrar janji:

Dengan nama Allah, kami bersumpah:

Dengan segala daya upaya serta jalan yang bagaimana-pun kami akan meneruskan cita-cita dan perjuangan bangsa kami.

Dalam pertemuan sebelas orang murid PMDS ada dua hal yang disepakati. Pertama, rakyat sangat tertekan di Minangkabau akibat rasa ngeri, takut atas tindakan Belanda menghancurkan gerakan Komunis karena peristiwa Silungkang 1927 itu. Kedua, usaha yang dapat dilakukan untuk menghilangkan kengerian masyarakat itu (Salim, 1980:11).

Pertemuan El-Hilaal berakhir dengan terpilihnya M. Yunus Kocek sebagai ketua, Leon Salim (sekretaris), dan Mahyuddin Tonex sebagai komisaris. Berselang sebulan kemudian, pengurus El-Hilaal membutuhkan calon pengurus untuk Biro Pendidikan, dan menerjemahkan buku-buku *padvinders* berbahasa Inggris dan Belanda.

Untuk mengelola buku-buku dalam bahasa Inggris, kami memerlukan seorang yang sanggup menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.” (Salim, 1987: 8).

Leon pada masa pergerakan memang cukup dekat dengan Abdullah Basa Bandaro –seorang saudagar di Pasar Gadang, perintis Adabiah School, dan pendonor surat kabar di Sumatra Barat. Basa Bandaro kemudian mereferensikan seorang autodidak, pernah bersekolah di MULO, dan guru di HIS Muhammadiyah dan Madrasah Irsyadin Naas (MIN) Padang Panjang kepada Leon Salim. MIN merupakan institusi pendidikan yang didirikan oleh *Inyik* Haji Adam Balai-balai (Kahin, 1979).

Tokoh yang dimaksud Basa Bandaro adalah Chatib Sulaiman, anak angkatnya – yang nantinya di masa Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) menjabat sebagai Ketua Markas Pertahanan Rakyat Daerah (MPRD), dan tewas dalam peristiwa Situjuh Batur.

Leon pun segera menjumpai Chatib. Ia minta kesediaannya bergabung di El-Hilaal sebagai pengurus birokrasi pendidikan, sekaligus sebagai penerjemah, tanpa diberi honor. “Tapi kami menjamin, kalau kami makan, Chatib juga akan makan pula,” demikian janji Leon kepada sahabatnya itu (Salim, 1987: 8).

Chatib akhirnya menyetujui usul Leon. Dan, sejak itu pemuda bertubuh jangkung sering tinggal bersama sebelas orang pengurus El-Hilaal, sekaligus menjadi kakak yang menaungi mereka. Hampir seluruh buku panduan *padvinder* berbahasa Inggris diserahkan kepada anak Haji Sulaiman itu, untuk dijadikan rujukan anak-anak pandu El-Hilaal.

Leon menyadari, mereka juga harus membiayai hidup saudaranya itu. Honor yang diterima Chatib dari mengajar di HIS Mu-hammadiyah dan Madrasah Diniyah, tentu tidaklah mencukupi kebutuhannya. Leon yang masih berusia 17 tahun, mencari murid belajar biola, untuk Chatib. “Dan pada malamnya bersama M. Yunus Kocek–ketua kami–menggesek biola di gedung bioskop (film bisu),” ungkap Leon dalam manuskripnya.

Lain El-Hilaal, lain pula dengan kepanduan HW Padang Panjang. Rata-rata, sekolah di bawah binaan Muhammadiyah Padang Panjang, bersatu dalam wadah kepanduan HW. Pada masa awal, kepanduan ini dipimpin oleh Rasjid Idris (Sinaro Panjang, 1970). Kepanduan Hizbul Wathan terbentuk tanggal 1 Agustus 1927 (Ahmad, t.t: 3) Berikut susunan pengurusnya.

Ketua	: Rasjid Idris
Wakil Ketua	: Parwoto Adiwidjojo
Sekretaris I	: Ibdamin
Sekretaris II	: Zainoel Abidin Sju'aib (ZAS)
Juru Uang	: Samsudin
Anggota	: Ibn Abbas Pakih Tumanggung Rajo Sutan Arif.

Rasjid Idris dalam manuskripnya menulis, seorang calon pandu ketika memutuskan masuk HW, harus mengucapkan janji setianya,

Mengingat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan sungguh-sungguh :

1. Setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah, Undang-Undang, dan Tanah Air.
2. Menolong siapa saja semampu saya.
3. Setia menepati Undang-Undang Pandu HW (Sinaro Panjang, 1971: 2).

Selain, harus berikrar janji setia, seorang anggota HW, mesti taat pada Undang-undang yang telah ditetapkan sejak tahun 1918, yang terdiri dari sepuluh bagian, di antaranya: Pandu HW itu dapat dipercaya; Pandu HW itu setia dan teguh hati; Pandu HW itu siap menolong dan wajib berjasa; Pandu HW itu cinta perdamaian dan persaudaraan; Pandu HW itu sopan santun dan perwira; Pandu HW itu menyayangi semua makhluk; Pandu HW itu siap melaksanakan perintah tanpa membantah; Pandu HW itu sabar dan pemaaf; Pandu HW itu teliti dan hemat; dan Pandu HW itu suci dalam hati, pikiran, perkataan dan perbuatan.

Adapun metode kepanduan yang diterapkan semasa kepemimpinan Rasjid Idris ada lima tahapan, yakni pemberdayaan anak didik lewat sistem beregu; kegiatan dilakukan di alam terbuka; pendidikan dengan metode yang menarik, menyenangkan, dan menantang; penggunaan sistem kenaikan tingkat dan tanda kecakapan; dan sistem satuan dan kegiatan terpisah antara pandu putera dan pandu puteri (Sinaro Panjang, 1971: 3).



Gambar 4. Para anggota Hizbul Wathan (HW) tahun 1930. Hizbul Wathan pada awalnya dirintis KH. Mas Mansur tahun 1916, setelah ia meninggalkan Nahdatul Wathan  
Sumber: [hizbulwathan.or.id](http://hizbulwathan.or.id)

Untuk pemula di Hizbul Wathan, menurut Rasjid Idris, diawali dengan latihan baris-berbaris, pertolongan pertama, dan olahraga setiap Minggu sore. Sedangkan, pada Rabu malam, anak-anak muda itu diberi bekal keagamaan (Sinaro Panjang, 1971: 4).

## 2. Dirundung Perpecahan dan Gerakan Protes di Kediaman Asisten Residen Padang Panjang

### a. El-Hilaal mengalami friksi

Bertahan selama empat tahun, kepanduan El-Hilaal mengalami perpecahan. Palsalnya, Sumatra Thawalib pasca dilema *Kuminih* yang terkubur di peristiwa Silungkang 1927, kembali bergairah di pentas politik, dengan mengusung warna ideologi baru Islam dan Kebangsaan. Sejak 1930, Sumatra Thawalib telah menjelma sebagai Persatuan Muslim Indonesia (PERMI) (Kahin, 2008: 67).

Perubahan status ini terjadi pada Kongres ke-3 Sumatra Thawalib di Padang Panjang. Pada awalnya PERMI bermarkas di kota kelahirannya, namun kemudian pusatnya dipindahkan ke Padang. Pandangan PERMI yang berpaham Islam Kebangsaan itu, sejalan dengan pendapat banyak orang Minangkabau saat itu.

Pandangan ini mengkritik partai-partai nasionalis lainnya yang mengambil model gerakan nasionalis India dan

cenderung enggan mengakui Islam sebagai faktor pemersatu dalam perjuangan kemerdekaan. Karena itu PERMI sering bertentangan dengan organisasi nasionalis, maupun partai Islam yang cenderung hanya mendasarkan diri pada satu paham saja (Kahin, 1979: 62-63).

Aktivis PERMI dari podium ke podium menggerakkan kesadaran rakyat, sekaligus mengenalkan organisasi mereka, rupanya berpengaruh kuat terhadap keutuhan El-Hilaal. Leon sebagai sekretaris, tidak kuasa menghindari perpecahan ditubuh El-Hilaal dalam *openbare vergadering* di Padang Panjang.

Usaha kami supaya El-Hilaal jangan pecah, tidak dapat kami wujudkan. Memang, kami sudah berdiri di atas dua pematang yang berlainan. Apalagi sekarang, sesudah Persatuan Sumatera Thawalib menjadi partai politik yang sedang memperlihatkan kekuatannya. Jelas, daya upaya kami untuk mengatasi tak mungkin berhasil (Salim, 1980: 19).

Rapat umum yang dihadiri ratusan peserta dari puluhan cabang, menyetujui perpisahan mereka, dengan satu komitmen dasar. Mereka berjanji tetap memperkuat barisan gerakan pemuda Indonesia. Setelah acara ditutup, Chatib mengum-pulkan ratusan anak pandu El-Hilaal yang telah terpecah dua berkumpul di kantor Pasar Usang.

Tidak lama berselang, wakil dari Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI), Sarekat Islam *Afdeling* Pandu (SIAP) dari Fort de Kock, Natipy, dan Hizbul Wathan Padang Panjang berkumpul bersama El-Hilaal dalam satu barisan. Barisan itu mulai bergerak diiringi terompet dan genderang menuju pusat pemerintah *Afdeling* Tanah Datar.

Melihat barisan kepanduan, masyarakat di sekitar Pasar Padang Panjang segera mengerubungi mereka di kiri dan kanan jalan. Mereka pun berteriak riuh-rendah dan mengelukan barisan muda

yang bergerak teratur dan terus menyemangati mereka, untuk melupakan sejenak kesusahan pasca Gempa 1926 dan depresi ekonomi (*malaisie*).

Dampak *malaise* memang berpengaruh besar terhadap pemerintah dan negeri jajahan. Pemerintah Kolonial Belanda kala itu, bersikukuh mempertahankan standar emas dan tidak mendevaluasi guldenya, telah menyeret Hindia Timur masuk ke jurang krisis keuangan terburuk selama beberapa tahun.

Kondisi serupa juga menimpa Padang Panjang, yang masih *merecovery* perekonomian pasca Gempa 1926. Asisten Residen harus menjalankan instruksi de Jonge—dalam beberapa kebijakan yang membebani pegawainya, sekaligus membuat rakyat Padang Panjang kembali dikenai *belasting*. Beberapa instruksi de Jonge—kemudian dikenal sebagai politik deflasi, antara lain: menurunkan gaji dan upah, mengadakan pajak-pajak baru dan menurunkan berbagai tarif dan lainnya.

Grafik fluktuatif ekspor-impor di Hindia Timur bisa dilihat sejak 1926-1930. Pada tahun 1926 harga ekspor sebesar 1599 ton dan impor 924 ton; pada tahun 1927 meningkat menjadi 1656 ton untuk ekspor dan impor sebesar 927 ton. Pada tahun 1929, atau jelang depresi ekonomi, grafik ekspor menunjukkan kenaikan tajam sebesar 1488 ton dan impor 1166 ton. Memasuki tahun 1930 nilai ekspor Hindia Timur menurun 1192 ton dan impor sebesar 932 ton. Ketika wabah *malaise* melanda Hindia Timur, ekspor menurun tajam ke angka 798 ton dan impor menurun 610 ton.

Dari tahun 1929 hingga 1930, rata-rata harga barang ekspor Hindia Belanda menurun sebesar 28%. Tahun berikutnya harga kembali turun sebesar 25% yang disusul kejatuhan berturut-turut sebesar 21% dan 11%. Pada tahun 1933 harga itu menjadi 35% dari keadaan tahun 1929 dan kurang dari 31% terhadap harga rata-rata masa 1923-1927 (*Persamaan*, 1 November 1935).

Catatan dari *Persamaan* menginformasikan, bahwa jelang depresi perekonomian Hindia Timur tampak dinamis. Hal ini ditandai, dengan meningkatnya jumlah ekspor hasil-hasil pertanian dan pemenuhan kebutuhan material rakyat di pedesaan, melalui impor luar negeri. Kesulitan yang dialami Hindia Timur pada masa depresi ekonomi dirasakan—terutama untuk ekspor gula, teh, tembakau dan nila.

Krisis ekonomi dunia begitu keras menghantam Hindia Belanda karena pada saat itu ekonomi negeri jajahan sangat bergantung kepada ekspor, khususnya ke pasar Eropa. Industri yang berkembang di Hindia-Belanda, umumnya adalah perkebunan, bergantung pada pasar Eropa. Ketika pasar Eropa merosot, maka industri di Hindia Belanda juga turut merosot: Harga gula jatuh sampai 22 % daripada harga tahun 1925; getah sampai 10 %; kopra sampai 18% , teh 50% dan kopi 27 %. Rata-rata harga barang penghasil tanah-tanah jajahan jatuh di pasar Eropa sampai lebih kurang 31% (Sufyan, 2018).

#### **b. Menggugat Asisten Residen Padang Panjang**

Dampak kebijakan de Jonge, telah menyeret nagari-nagari di Padang Panjang dan *Afdeling* Tanah Datar ke arah depresi ekonomi—yang ditandai menurunnya harga hasil bumi, ketela, jagung dan padi. Hampir setiap hari laki-laki yang duduk di kedai-kedai kopi, mengeluh berkurangnya sewa tanah dan upah buruh tani. Kondisi yang lebih buruk, terlihat pada grafik ekspor-impor tahun 1926-1931, terutama dari hasil bumi dan perkebunan di Hindia Timur.

*Tjaja Sumatra* memberitakan, bahwa kesulitan ekonomi telah menimbulkan gejolak politik ekonomi yang pada satu pihak menjalankan penghematan secara besar-besaran. Di pihak lain, pemerintah hendak mempertahankan pendapatan ekspor terutama yang diperoleh dari hasil perkebunan, padahal nilai *gulden* yang dipertahankan telah mengurangi daya beli

negara-negara pengimpor (*Tjaja Sumatra*, 2 November 1930).

Asisten Residen Padang Panjang dibuat pusing, dengan defisit dalam neraca keuangan. Untuk menyiasati ekonomi yang tidak kunjung membaik dan membayar gaji pegawai, ia mengajukan tambahan kepada de Jonge.

De Jonge pada masa panceklik itu, harus mengambil pilihan pahit. Tenaga pegawai dikurangi, pemotongan gaji, dihentikannya penam-bahan perekrutan pegawai dari Eropa, program pensiun lebih awal dicanangkan, biaya belanja pemerintah daerah dikurangi, dikenainya cukai tambahan untuk kas negara kolonial. Tentu saja, depresi ekonomi telah menambah derita untuk pegawai Padang Panjang dan Tanah Datar.

Kebijakan Asisten Residen yang memberatkan masyarakat Padang Panjang masa itu, menyulut protes kelompok kepanduan yang telah bergerak dari Pasar Usang ke Guguk Malintang, atau tepatnya di rumah Asisten Residen Padang Panjang.

Asisten Residen yang mendengar suara gaduh, segera berlari ke arah kerumunan. Sumpah serapah dalam dialek Minang keluar dari bibirnya. Ia memerintahkan *veldpolitie* membubarkan iringan *padvinder* yang mengganggu ketenangan-nya. Lebih lanjut Leon Salim mengungkap dalam narasi ingatannya.

Ia menyumpah-nyumpah dalam dialek Minang, memerintahkan polisi menstop *marseren* anak-anak pandu itu. Kemudian polisi datang berlarian membubarkan barisan yang panjang sebagai ular itu (Salim, 1980: 19).

Semua pimpinan *padvinder*, termasuk Leon, Mahyuddin Tonex ditangkap dan dibawa menemui Asisten Residen. Meskipun pada hari Minggu libur, rupanya penguasa Padang Panjang itu, tetap berkantor. Tujuannya untuk mengadili pimpinan kepanduan yang dituduh berdemonstrasi tanpa izin, dan merusak *rust en orde*.

Seluruh peserta *marseren* yang berasal dari Fort de Kock diperintahkan pulang ke rumahnya. Mereka diberikan ampunan, dan tidak diproses hukum, dengan syarat tidak mengulangi perbuatannya. Untuk seluruh anggota Kwartir Besar El-Hilaal dan *troepleaders* dihadapkan ke pengadilan rendah pada hari itu juga.

Hasilnya, hakim Pengadilan Rendah menghukum kurungan untuk pimpinan pandu, anggota Kwartir Besar El-Hilaal, Hasanuddin Yunus—kepala pasukan Tandikat El-Hilaal, dan dua pimpinan Hizbul Wathan.

Leon Salim kemudian mengisahkan nasibnya dengan beberapa tahanan, “Hari itu juga, kami digiring masuk penjara Padang Panjang. Rupanya Tuhan mentakdirkan kami, pemuda Minangkabau—adalah pemuda-pemuda yang pertama kali mengetuk pintu penjara, setelah aksi pemerintah Kolonial Belanda menghancurkan pemberontakan Silungkang 1926,” (Salim, 1980: 20).

### 3. Habis El-Hilaal, Terbitlah KIM dan PNI Baru

Sebulan dikandang *situmbinkan*, Leon es dibebaskan. Tidak pernah ada kata jera, dalam kamus pengurus El-Hilaal tersebut. Mereka segera menghidupkan kembali *padvinder*, pasca perpecahan ditubuh El-Hilaal. Mereka menamakan *padbinders* untuk Persatuan Murid Diniyah School (PMDS) itu, Kepanduan Indonesia Muslim (KIM) pada Juli 1931.

#### a. Berdirinya Kepanduan Indonesia Muslim

Penggunaan kata Indonesia dari rangkaian akronim KIM tentu menarik dicermati. Pengakuan keindonesiaan bisa diklaim kali pertama di Sumatra, ketika kelompok *padvinder* Islam mau melekatkan kata—yang hanya diadopsi dua organisasi pergerakan nasional, yakni Perhimpunan Indonesia (PI), dan PNI. Namun, tidak diketahui lebih lanjut dalam Anggaran

Dasar KIM menggunakan asas kebangsaan, sebagaimana yang dilakukan oleh PERMI.

Kepanduan milik PMDS, dalam struktur organisasinya disusun sistematis. Struktur tertinggi pengurus dipegang oleh Dewan Kepanduan, yang terdiri dari dua bagian. Pertama Sidang Penasehat yang dijabat oleh Chatib Sulaiman, M. Yunus Kocek, dan Leon Salim. Kedua, sidang pimpinan dipegang oleh Muktar Latief (kepanduan putra), Dahniar Zainuddin, Timur Latif, dan Dinar Sulaiman (kepanduan putri).



Gambar 5. Kongres pembentukan Kepanduan Indonesia Muslim (KIM) yang dilaksanakan perkumpulan PMDS pada Juli 1931  
Sumber: Salim, 1931.

Sebagai catatan, sidang penasehat terdiri dari mereka yang sudah beranjak dewasa dan terpanggil untuk masuk dalam kancah politik. Sedangkan sidang pimpinan adalah mereka yang diwajibkan melaksanakan secara bersama melalui sistem musyawarah. Menurut Salim (1987: 10) Dewan Kepanduan harus bermufakat sekurangnya sekali sebulan untuk meyakinkan kader. Sedangkan untuk Padang Panjang dilakukan dua kali sebulan yang dipraktikkan Dewan Pimpinan dan Dewan Pasukan.

Khusus untuk di luar Padang Panjang, satuan kepanduan dinamai Dewan Pasukan, sedangkan untuk Cabang dinamakan pasukan-pasukan. Sistem yang dirancang oleh Chatib merupakan penerapan dari sistem sosialisme kedalam gerakan kepanduan, yang mengedepankan disiplin yang kuat.

Kemahirannya dalam merancang struktur KIM yang mengikutsertakan

perempuan, memang mencengangkan. Apatahlagi, awal abad ke-20 masih didominasi pengaruh adat Minangkabau. Terobosan yang dilakukan KIM memang tergolong berani, melabrak aturan-aturan dari budaya Minang, yang tidak membolehkan perempuan masuk dalam budaya maskulin.

Pada masa pembentukan *padvinder*, di daerah manapun di Indonesia, belum dicanangkan integrasi kepanduan berdasar gender. “Bayangkan, kalau ditengah-tengah alam Minangkabau yang teguh beradat itu, kini gadis-gadisnya ikut dalam gerakan kepanduan, berbaris di lapangan dan di jalan raya. *Limpapeh rumah gadang*, penghias rumah adat itu, kini berbaris di jalan raya,” demikian ungkapan kagum Leon atas keberhasilan KIM membuat terobosan baru.

Empat bulan pasca terbentuknya, KIM memasuki masa-masa menentukan dalam gerakannya. Iven penting itu, bersamaan dengan kepulauan pimpinan baru PNI, Bung Hatta ke Fort de Kock pada November 1932.

Mendengar kabar Hatta, pengurus KIM tidak membuang kesempatan. Pada 10 November 1932 mereka segera menjemput Hatta untuk bertandang ke PMDS, guna menjelaskan kondisi politik terkini, dan berita seputar PNI Baru. Sehari kemudian, Hatta berpidato di ruangan Perguruan Diniyah Putri, kemudian bermalam di PMDS.

Pengurus KIM menyerahkan majalah *Obor* pada Bung Hatta. Majalah ini diterbitkan Partai Republik Indonesia (PARI) dan pengurus KIM memperolehnya dari Kandur Sutan Rajo Basa—seorang pengikut setia Tan Malaka yang dibuang ke Digul tahun 1934 (Malaka, 1986). Pagi harinya, Hatta bertolak ke Padang. Setelah mengantar Ketua PNI Baru tersebut, pengurus kembali meneruskan tidurnya.

Saat matahari naik sepenggal, pengurus yang lelap tertidur dikejutkan suara Kraink—kepala polisi *Politiek*

*Inlichtingen Dienst* (PID) yang memanggil dengan suara keras. PID adalah semacam badan penyelidik yang berasal unsur *veldpolitie*. Polisi-polisi PID ini merupakan momok menakutkan untuk dunia pergerakan dan merupakan alat yang ampuh, untuk melumpuhkan *vereeniging*.

Pengurus KIM tampak kebingungan mencari majalah *Obor*, apakah sudah dibawa Hatta, atau malah sebaliknya?. "Sementara itu, gedoran pintu oleh polisi menjadi-jadi. Seperti kucing hendak menerkam tikus, saya cari majalah itu." kenang Leon dalam autobiografinya.

Rupanya Hatta meninggalkan *Obor* di bawah bantalnya. Leon berpikir keras, menyembunyikan majalah itu, sedangkan PID sudah puluhan kali menggedor pintu markas mereka.

Di tengah suasana kalut, Leon sudah terbayang Digul yang menanti mereka. Digul merupakan kamp tahanan politik yang dikenal menyeramkan dan terletak jauh di pedalaman. Banyak di antara tahanan politik menjadi korban keganasan alam, dan penyakit yang ditularkan nyamuk malaria hutan yang mematikan. Kemu-dian, mata Leon tertuju pada peti penyimpanan trompet milik KIM. "Saya ambil bambu bambung. Saya lipat *Obor* itu dan diletakkan di dasar bambung" terang Leon dalam manuskripnya.

Setelah memastikan aman, Leon, Bakhtiar Latif, dan Chatib segera membuka pintu, seolah baru terbangun dari tidur. Pengurus KIM yang lain, seolah tampak masih tidur, dengan jendela rumah yang tertutup rapat. Kepala PID segera masuk ke ruangan rumah, dan memperhatikan keadaan sekitarnya yang masih samar-samar.

Polisi PID segera menyebar di setiap sudut ruangan. Tanpa bicara, mereka memeriksa setiap benda yang ditemui. Lemari diperiksa, kasur ditelungkupkan, di bawah tempat tidur, rak buku, lemari pakaian, hingga dibawah tikar pun ditelisik. Leon makin khawatir *Obor* ditemukan. "Makin mendekat ke tempat alat musik, makin mendekat juga bayangan

Digul di otakku!" demikian tulis Leon Salim dalam Sufyan (2018: 35)

Chatib Sulaiman segera mengikuti langkah Kraink. Ia berupaya mengalihkan perhatian dan mencegah kepala PID melangkah ke kotak musik. "Kalau mau bertemu Hatta, tunggu saja nanti sore, ia ke Bukittinggi.". ujar Chatib. Kraink hanya menjawab singkat, "Tidak!" Ia menginstruksikan anak buahnya mengumpulkan dan membawa buku PMDS, dan catatan pribadi pengurus KIM. Rombongan Kraink pun meninggalkan markas KIM.

#### **b. Bermetamorfosa Menjadi PNI Baru**

Sejak hadirnya Bung Hatta di PMDS, pengurus KIM hampir seluruhnya setuju melibatkan diri dalam perkumpulan PNI Baru. Beberapa anggota PMDS, memang ada yang keberatan, bila membawa Diniyah School dalam gerbong PNI Baru. "Mereka meminta kami memasuki dan memperkuat partai-partai politik yang telah ada, seperti PERMI dan PSII." tulis Leon (Salim, 1980: 8).

Akhirnya pengurus KIM dan PMDS membulatkan tekad, untuk mendirikan PNI Baru. Chatib selaku penasehat KIM, sedari awal telah menegaskan ketertarikannya bergabung di PNI Baru. Bacaan-bacaannya sebelum bergelut di panggung politik, telah mengantarkannya pada wacana besar nasionalisme.

Pada Desember 1932 berdirilah PNI Baru Cabang Padang Panjang, Bukittinggi, Maninjau, Pariaman, dan Padang. Masing-masing cabang, diketuai oleh Leon Salim, Rahimi, Darwis Thaib, S. Thaib, dan M. Nur Arif (Salim, 1980: 24).

Sejak berdiri di Padang Panjang, plang nama PMDS diturunkan, berganti dengan PNI Cabang Sumatera Barat. Jadilah, masing-masing sekolah Islam modernis di Padang Panjang di tahun 1930an, terlibat dalam politik praktis. Sumatera Thawalib dengan PERMI, dan Perguruan Diniyah lewat PNI Baru.



Gambar 6. Konferensi pimpinan PNI Baru Sumatera Barat 24-28 Maret 1933  
Sumber: Salim, 1933.

Chatib sendiri didaulat sebagai anggota pimpinan umum PNI Baru Sumatera Barat, dengan posisi pengkader. Suasana dalam kursus-kursus yang diselenggarakan oleh perkumpulan di bawah binaan Chatib dan kesungguhan anggota-anggotanya, mengingatkan banyak orang Minang kepada *Workers Education Association* (WEA).

Anggota perkumpulan sebagian besar berpendidikan menengah. Mereka menginginkan, program pendidikan politik berwarna sosialis, yang akan membawa PNI Baru melampaui batas-batas agitasi nasionalisme sempit. Lewat strategi ini, PNI Baru dibawah kepemimpinan Hatta dan Sjahrir, mengembangkan suatu pandangan dunia yang khas dan cara unik, dalam membahas masalah-masalah yang sedang dihadapi kaum pergerakan.

Pada tanggal 24 Maret 1933 diselenggarakan konferensi pertama PNI Baru di Padang Panjang. Dalam rapat yang dilaksanakan selama empat hari, seluruh pimpinan menyiapkan program kerja, dan mengembangkan cabang PNI Baru di seluruh Sumatera Barat. Pengurus kemudian merumuskan pendidikan politik untuk rakyat, taktik dan strategi—yang diarahkan pada kader-kadernya.

Selama konferensi berlangsung, memang menghadapi tantangan berat—terutama lawan-lawan politiknya, termasuk pemerintah Kolonial Belanda. Seiring meningkatnya tekanan politik dari pemerintah Belanda pada tahun 1933, PNI

Baru menempuh taktik-taktik yang membedakannya dengan PNI yang didirikan Bung Karno.

Bung Hatta mengembangkan wacana, bahwa aksi massa benar-benar sulit dilaksanakan di negeri jajahan. Dan, loyalitas kepada seorang pemimpin saja, berujung lumpuhnya *vereeninging*, bila si pemimpin ditangkap. Program pendidikan politik yang PNI Baru di Sumatera Barat, bertujuan menghasilkan kader-kader pemimpin yang siap menggantikan siapapun yang ditangkap pemerintah (*Suara Sosialis*, tanggal 19 Agustus 1956).

Inilah yang membedakan antara PNI Baru dengan PNI 1927, dan Partindo. PNI Baru, menurut Bernhard Dahm (1987), banyak berhutang kepada tradisi sosial demokrasi Eropa. Ciri khasnya adalah pengutamaan terhadap teori sosial sebagai suatu pedoman aksi, adanya koherensi pada pandangan dunianya yang merangkul analisis-analisis tentang kapitalisme, imperialisme dan munculnya fasisme yang saling melengkapi dan berusaha untuk menempatkan Indonesia dalam suatu gambaran global.

PNI Baru bersikap kritis terhadap PNI dan Partindo dengan model agitasi ekspresif dan mempertahankan persatuan nasional sebagai syarat mutlak. Bagi Hatta dan Sjahrir, persatuan tidak ada artinya, kecuali bila didasarkan pada pengertian atas prinsip-prinsip bersama.

Bila ditelisik lebih dalam, gerakan perlawanan PNI Baru memang ada nuansa Marxisnya. Dalam pendidikan politik, dirumuskan pentingnya perjuangan melawan *borjuis* pribumi. Dengan demikian, perkumpulan nasionalis dalam gerakannya mengalami polarisasi, yakni aksi massa dan model pembentukan kader (Rutgers, 1937 dan Suhartono, 2001).

Pada 28 Maret 1933, Konferensi PNI Baru memutuskan, untuk menggalang calon-calon kader di nagari-nagari. Di setiap nagari, nantinya akan berdiri ranting dari perkumpulan yang ditugasi, untuk memberi pendidikan politik dan kesadaran pentingnya kemerdekaan.

Kesadaran orang Minang terhadap falsafah *alun takilek, lah ta kalam*—dalam perspektif Chatib seharusnya makin terasah. Sehingga mereka menjelma menjadi pribadi yang kritis, bukan penurut. “Manusia-manusia kritis, akan memudahkan jalannya pendidikan itu. Hanya penyuluh yang adil dan yang dapat dipikirkan olehnya sajalah yang kita perlukan,” tulis Chatib sebagaimana dikutip Salim (1980: 25).

Dalam menjalankan aktivitas organisasi, PNI Baru memang berhasil menambah kader yang tersebar di seluruh Sumatera Barat. PNI Baru berhasil menanamkan rasa nasionalisme, kolektivisme, dan kedaulatan rakyat yang cepat tersebar dan menginginkan kemerdekaan Indonesia.

Menentukan berhasil, atau tidaknya strategi, dibuktikan oleh PNI Baru lewat obrolan di lepau-lepau (kedai kopi). Sambil menghirup kopi yang mengepul, ditemani beberapa potong goreng pisang, mereka biasanya akan mengobrol banyak hal tentang politik dan pergerakan. Chatib sendiri menyebut kedai kopi sebagai parlemen dengkulnya orang Minang. Makin banyak mereka membicarakan masalah politik dan parlemen, menampakkan keberhasilan pendidikan politik PNI Baru.

Tingginya kesadaran nasionalisme orang Minang pada tahun 1930an, telah mencemaskan pemerintah Kolonial Belanda. Gubernur Jenderal de Jonge memang berbeda dengan de Graff. Ia tidak punya waktu mendengarkan kritik dari kaum pergerakan dan menganggap semua ocehan mereka sebagai agitasi yang harus segera dibungkam (Van Miert, 2003).

Pergantian pucuk pimpinan negeri jajahan dari de Graff ke de Jonge merupakan penegasan prinsip etis dan non-etis, dengan tujuan mempertahankan dengan segala upaya *rust en orde*—yang berarti menghambat perubahan di dalam masyarakat dan mencegah gerakan *reformis*.

Pada masa kekuasaannya, de Jonge tidak mengakui eksistensi pergerakan, berdasarkan pasal-pasal karet demi melindungi *rust en orde*. Pada Agustus 1933, kembali ia mengeluarkan aturan larangan berkumpul dan *openbare*, seperti hukuman bagi pegawai yang menggabungkan diri pada kegiatan ekstrimis, dan hak-hak membuang dan menginternir kaum nasionalis radikal.

Memasuki Agustus 1933, pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan larangan ber-kumpul—atau dikenal dengan istilah *vergader verbond*. Kata politik menjadi momok menakutkan bagi bumiputra, dan PID diberi kuasa untuk meringkus aktivis pergerakan. “*Vergader verbod* sudah menjadi palu godam membunuh gerakan kemerdekaan!” demikian tegas Chatib.

Tingginya intensitas PNI Baru, rupanya menggelisahkan Asisten Residen Padang Panjang. Ia mengerahkan Kraink untuk mengawasi gerak-gerik Chatib cs yang berkantor di PMDS. Anggota PID disebar dan diberi kuasa, untuk menghadiri setiap rapat yang bersifat politik, maupun tidak.

PID diberi wewenang untuk menghentikan *spreaker* yang mengancam politik pemerintah, membubarkan rapat, serta menangkap peserta yang dicurigai. “Tiga orang dari satu partai politik yang berjalan bersama boleh ditangkap dianggap mengadakan rapat,” demikian tulis Leon dalam manuskripnya.

Menguatnya pengaruh Chatib lewat pendidikan politik di PNI Baru, membuat Asisten Residen Padang Panjang was-was. Ia cemas melihat besarnya pengaruh Chatib yang menyebarluas di kalangan ulama, kaum terdidik, dan tidak terdidik. Untuk melemahkan PNI Baru, penguasa Padang Panjang berupaya keras menekan pemuda jangkung itu meninggalkan dunia pergerakan.

Pada Januari 1934, Chatib dipanggil Asisten Residen Padang Panjang. Dengan nada yang awalnya lembut, ia bertanya, mengapa kelompok PNI tidak kapok, dan tetap melakukan gerakan? Padahal,

menurut Asisten Residen *vergader verbond* sudah diberlakukan. Kemudian nada suara petinggi di Padang Panjang itu, tiba-tiba berubah. Ia mengancam Chatib untuk memecatnya sebagai guru, bila masih memegang posisi Komisaris Pimpinan Umum PNI Baru. Ia mengancam akan men-Digul-kan Chatib, bila tidak mau juga dijinakkan.

Inilah satu sebab yang membuatnya mengundurkan diri dari panggung politik. Chatib segera menemui sahabat karibnya, Leon Salim dan mengisahkan apa yang dialami. Sejak mundurnya Chatib, dan ditangkapnya beberapa pentolan PNI Baru yang radikal, perlahan gaung organisasi pergerakan itu meredup.

Pada tanggal 25 Februari 1934 jajaran teras organisasi, mulai dari Hatta, Sjahrir, Bondan, Burhanuddin, Murwoto Soeka, Hamdani, Wangsawidjaja, Basri, Atmadipura, Oesman, Setiarata, Kartawikanta, Tisno, Wagiman, dan Karwani ditangkap.

Sekitar Januari 1935, Hatta, Sjahrir dan beberapa pemimpin PNI Baru lainnya diasingkan ke Digul kemudian dipindah ke Banda Neira. Dan sejak berakhirnya PNI-Baru dan tekanan kuat terhadap protes, hampir seluruh *padvinders* di Padang Panjang beralih untuk memusatkan dirinya pada gerakan kependuan semata.

#### D. PENUTUP

Hadirnya kependuan –sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah Padang Panjang pada masa Kolonial Belanda, memang senantiasa unik dibicarakan. Kemunculan dari *padvinders* di sekolah-sekolah partikelir Islam modernis seperti El-Hilaal dan Hizbul Wathan awalnya hanya sebatas meningkatkan keterampilan, dan mencintai alam, malah telah bermuara pada gerakan protes dan politik.

Satu-satunya *padvinder* yang mengusung warna politik adalah *Internationale Padvinders Organisatie* (IPO). IPO lahir dari rahim Rakyat School

milik Sarekat Rakyat Padang Panjang – yang mengusung warna ideologi *Kuminih*.

Perubahan orientasi masing-masing kependuan terjadi memasuki awal tahun 1930. Sumatera Thawalib yang dulunya pernah dijangkiti demam *Kuminih*, telah bermetamorfosa menjadi PERMI. El-Hilaal pun segera bergabung dengan organisasi induknya yang mengusung warna Islam dan Kebangsaan.

Persatuan Murid Diniyah School (PMDS) yang telah ditinggalkan El-Hilaal, segera membentuk Kependuan Indonesia Muslim (KIM) –turut larut dalam wadah gerakan politik Pendidikan Nasional Indonesia, atau dalam narasi sejarah dikenal dengan nama PNI Baru. Bermetamorfosanya dua kependuan dari masing-masing sekolah swasta Islam di Padang Panjang itu diduga kuat dipengaruhi *euforia* zaman baru–yang menginginkan terbentuknya identitas dan penguatan gerakan politik yang dilakoni oleh pribumi.

Tingginya rasa nasionalisme para pelajar yang tergabung dalam partai politik lokal itu, juga erat hubungannya dengan menguatnya Padang Panjang sebagai lokus utama pergerakan modernisasi Islam dan *Kuminih* pada tahun 1920an. Sehingga semangat anti kolonial memang telah terpatri dari diri pengurus kependuan KIM –yang berafiliasi pada PNI Baru Hatta dan Sjahrir.

Namun, kuatnya pengekanan terhadap gerakan protes yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah Kolonia Belanda, menjadi catatan suram dan berakhirnya kancah *padvinders* di Padang Panjang di pentas politik.

#### DAFTAR SUMBER

- Abdullah, T. (1971). *School and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra (1927-1933)* Ithaca New York: Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program Cornell University.
- Ahmad, H. (t.t.) “Ulang Tahun Muhammadiyah ke-62.”. *Manuksrip*.

- Azra, A. (2004). Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia. Yogyakarta: Kencana.
- Bintang Hindia* No.3. (1904).
- Dahm, B. (1987). *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: LP3ES.
- Djago! Djago!*. (4 April 1924).
- Dobbin, C. (2008). *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Padri Minangkabau 1784-1847*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Furnivall, J. S. (1948). *Netherlands Indies: A Study of Plural Economy*. London: Cambridge, University Press.
- Kahin, A. (1979). *Perjuangan Kemerdekaan Sumatera Barat dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945-1950*. Padang: MSI Cabang Sumatera Barat bekerja sama dengan eks Tentara Pelajar Sumatera Tengah (CTP)/ Pelajar Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.
- Kahin, A. (2008). *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kartodirdjo, S. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. (1975). *75 Tahun Kepanduan dan Kepramukaan*. Jakarta: Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- Lauer, R. H. (2001) *Prespektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lindblad, T. J. (1998). *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia; Berbagai Tantangan Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Lloyd, C. (1993). *The Structure of History*. Cambridge: Blackwell.
- Malaka, T. (1986). *Menuju Republik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Massa.
- Margana, S., Ningrum, S. U. D., Handayani, A. (Ed). (2018). *Agama dan Negara di Indonesia. Pergulatan Pemikiran dan Ketokohan*. Yogyakarta: Ombak.
- McCarthy, J. D. & Mayer N. Zald (1977). Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. *American Journal of Sociology*, 82 (6).
- Nederlandsch Indische Havens* (1920).
- Persamaan*. (1 November 1935).
- Prasetyaningtyas, Y. (2012). *Status Keanggotaan Warga Negara Asing dalam Gerakan Pramuka Ditinjau dari Peraturan Perundangan*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Rutgers. SJ. (1937). *Indonesia: Het Koloniale Systeem In The Periode Tussen De Eerste En De Tweede Wereldoorlog Door*. Amsterdam: Pegasus Amsterdam.
- Salim, L. (1977). *Riwayat Hidup Leon Salim*. Catatan pribadi, tidak diterbitkan.
- Salim, L. (1980) *Hidup untuk Berdjoang*. Naskah tidak diterbitkan.
- Salim, L. (1987). *Chatib Sulaiman*. Naskah tidak diterbitkan.
- Sinaro Panjang, Rasjid Idris Dt. (1970). *Ber Muhammadiyah dan Hizbul Wathan*. Padang Panjang. Naskah tidak diterbitkan.
- Sinaro Panjang, Rasjid Idris Dt. (1971). *Sedjarah Perguruan dan Asrama Putri Muhammadiyah Padang Pandjang*. Naskah tidak diterbitkan.
- Suara Sosialis*. (19 Agustus 1956).
- Sufyan, F. H. (2017). *Menuju Lentera Merah. Gerakan Propagandis Komunis di Serambi Mekah 1923-1949*. Yogyakarta: UGM Press.
- Sufyan, F. H. (2018). *Sang Repubiken. Biografi Chatib Sulaiman 1927-1949*. Padang: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang).
- Suhartono. (2001). *Sejarah Pergerakan Nasional (Dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1944)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surat Asisten Sumatera Barat* No.2505/P/Geheim. (10 November 1933)
- Susanto, A. S. (1983). *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Binacipta.
- Tjaja Sumatra*. (2 November 1930).

- Triyana, B. (2014). Sekolah ala Tan Malaka, dari <http://historia.id/modern/sekolah-ala-tan-malaka>
- Turner, R. & Killian, L. (1987). *Collective Behaviour*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
- van Doom, L.J.A.A. (1895). *De Laatsteeuw van Indie Ontwikkelingen Ondergang van een colonial Project*. Amsterdam: Uitgeverij BertBakkerm.
- Van Miert, Hans (2003). *Dengan Semangat Berkobar. Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia 1918-1930*. Jakarta: KITLV, Hasta Mitra, dan Penerbit Utan Kayu.
- Verslag der Exploitatie van den Staatsspoorweg ter Sumatra's Westkust en van de Ombilin-kolenvelden over 1893*. Batavia: Landsdrukkerij, 1894-1930.
- Yunus, A. N. (1963). *Melirik Padang Panjang Kota Serambi Mekah*. Padang Panjang. Naskah tidak diterbitkan.
- Zed, M. (2004). *Pemberontakan Komunis Silungkang 1927. Studi Gerakan Sosial di Sumatera Barat*. Jakarta: Syarikat.